

Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro

(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management, NUP: 9903252922

Rector, Cenderawasih State University (1978-1988)

Rector, Krida Wacana Christian University (1991-2000)

© RUDYCT e-PRESS

rudyct75@gmail.com

Bogor, Indonesia

9 May, 2025

*Rudy C Tarumingkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)*

Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro (10 Desember 1905 - 23 September 1981)

Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro lahir dengan nama Sukamto pada 10 Desember 1905 di Sragen, Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan hukum di Rechtshogeschool, Jakarta, dan meraih gelar Meester in de Rechten pada 1929, dilanjutkan dengan gelar Doctorandus in Indologie dari Universiteit Leiden, Belanda, pada 1932. Setelah kembali ke Indonesia, Notonagoro bekerja di Kantor Pusat Ekonomi Surakarta (1932–1938) sambil mengajar di sekolah menengah di Jakarta (1933–1939). Tahun 1949, ia dipanggil untuk membantu pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, kemudian menjadi Dekan Fakultas Hukum (1952) dan pendiri Fakultas Filsafat (1968) [Wikipedia](#).

Pada 19 Desember 1973, UGM menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Filsafat kepada Notonagoro sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara. Gelar kehormatan ini meneguhkan posisi akademisnya sebagai tokoh pertama yang secara sistematis memandang Pancasila bukan sekadar dasar konstitusional, melainkan sebagai kerangka konseptual yang memuat dimensi politik, sosial-budaya, dan religius secara terpadu [ScribdKagama](#).

Karya-karya Utama

1. **Pancasila: Dasar Filsafat Negara** (Pidato promotor pada promosi Doktor Honoris Causa Ir. Soekarno, UGM, 19 September 1951).
2. **Pemboekaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)** (Dies Natalis Universitas Airlangga, 10 November 1955).
3. **Beberapa Hal mengenai Falsafah Pantjasila** (1967).

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

4. **Skema Pendidikan Mental, Kesiapan Pribadi Pantjasila** (1969).
5. **Pancasila Secara Ilmiah Populer** (1970).
6. **Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia** (makalah pemerintah) [ScribdGuntara.com](https://www.scribd.com).

Pemikiran Filsafat Pancasila

Notonagoro memandang Pancasila sebagai sebuah **unit majemuk** (*a compound unit*), di mana kelima sila tidak dapat dipisah-pisahkan karena diletakkan dalam **hierarki piramidal**. Misalnya, sila pertama ("Ketuhanan yang Maha Esa") dianggap mencakup semangat keadilan (*just and civilized humanity*), persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial; sehingga melepas satu sila akan menggoyahkan keseluruhan struktur negara [WikipediaWikipedia](https://www.wikipedia.com).

Dalam kerangka ini pula, ia menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya suatu konsep politik, melainkan **weltanschauung** (pandangan hidup) yang bersifat *unchangeable*—artinya makna dasar dan aspirasi setiap sila ditujukan untuk generasi yang berbeda tanpa dipenggal dari konteks budayanya [Wikipedia](https://www.wikipedia.com).

Kontribusi dan Relevansi

1. **Implementasi Negara Monodualis**: Notonagoro merumuskan prioritas negara sebagai *monodualist state*—menjaga norma budaya sekaligus memelihara keamanan dan ketertiban publik dalam empat lapisan kebutuhan: negara, kolektif, kelompok, dan individu (termasuk kaum lemah) [Wikipedia](https://www.wikipedia.com).
2. **Pendidikan Karakter Pancasila**: Melalui karyanya "Skema Pendidikan Mental...", ia menawarkan pendekatan pedagogis untuk menyiapkan pribadi yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, relevan bagi kurikulum kontemporer [Scribd](https://www.scribd.com).

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

3. **Landasan Filosofis Kebijakan:** Banyak lembaga pemerintah menggunakan kerangka Notonagoro sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dasar, terutama yang berkaitan dengan penafsiran UUD 1945 dan implementasi nilai-nilai sosial-budaya [Scribd](#).

Diskusi dan Opini

Pendekatan Notonagoro sering dipuji karena **keterpaduan sistematisannya**, tetapi juga dikhawatirkan terlalu **normatif** sehingga kurang mengakomodasi dinamika sosial-politik modern. Sebagai contoh, struktur hierarkisnya menuntut agar setiap kebijakan yang hanya “memainkan” satu sila dianggap merusak keseluruhan, yang dalam praktik legislatif dapat menimbulkan debat panjang mengenai *mutual exclusivity* antar nilai. Meski demikian, **keabadian maknanya** tetap menjadi titik tolak yang kuat untuk reformasi terus-menerus tanpa melanggar esensi dasar bangsa.

Dengan wafatnya pada 23 September 1981 di Yogyakarta, Notonagoro meninggalkan warisan intelektual yang masih dijadikan rujukan utama dalam studi Pancasila, baik di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi pendidikan karakter. Kritik dan pengembangan terhadap konsepnya terus berlangsung sebagai upaya menjawab tantangan era digital dan globalisasi.

Dalam kelanjutan pemikiran Prof. Notonagoro, kita dapat menelusuri lebih jauh dua aspek penting: **esensi manusia Pancasila** menurutnya—yang kerap disebut sebagai tiga “monopluralis”—serta **penerapan filosofi Pancasila** dalam riset dan praktik pemerintahan.

1. Esensi Manusia Pancasila: Tiga Monopluralis

Notonagoro membedakan hakikat manusia dalam Pancasila ke dalam

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

tiga dimensi monopluralis, yakni aspek politik, sosio-budaya, dan religius. Masing-masing "monopluralis" ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan membentuk satu kesatuan utuh yang ia sebut *compound unit*. Misalnya, sila pertama ("Ketuhanan Yang Maha Esa") tidak hanya menegaskan aspek religius, tetapi sekaligus mensyaratkan keadilan dan peradaban manusiawi, persatuan bangsa, demokrasi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [WikipediaNeliti](#).

Lebih lanjut, Notonagoro merumuskan secara sistematis urutan hierarkis sila-sila dalam bentuk piramida: setiap sila merupakan penyempurnaan dan penjabaran sila sebelumnya. Dengan demikian, penetapan kebijakan atau norma yang hanya "memainkan" satu sila tanpa memperhatikan silih bergantinya struktur ini akan dianggap merusak keseimbangan keseluruhan sistem Pancasila [Wikipedia](#).

2. Penerapan dalam Riset dan Organisasi Publik

Pemikiran hirarkis dan semiotik Notonagoro juga diaplikasikan dalam studi tata kelola organisasi publik. Sebagai contoh, penelitian oleh Nanwiedha dkk. memanfaatkan kerangka "Pancasila Hierarchical-Pyramidal" untuk menganalisis kinerja organisasi sektor publik, menekankan bagaimana setiap lapisan nilai Pancasila memengaruhi struktur keputusan dan budaya kerja aparatur negara [ResearchGate](#).

Di lingkungan akademik UGM sendiri, sejak Seminar Pancasila I tahun 1959, gagasan Notonagoro telah diintegrasikan dalam kurikulum filsafat dan hukum tata negara. Seminar tersebut menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar doktrin konstitusional, melainkan "dasar negara yang mutlak dan objektif melekat pada kelangsungan negara, tidak bisa diubah dengan jalan hukum" [UGM Museum](#).

3. Implikasi Pendidikan Karakter

Dalam karya "Skema Pendidikan Mental, Kesiapan Pribadi Pancasila"

Rudy C Tarumingkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

(1969), Notonagoro mengusulkan model pedagogis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Ia menekankan pentingnya *internalisasi* berjenjang, di mana siswa tidak hanya mempelajari setiap sila secara kognitif, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari—misalnya, mengawal toleransi beragama (sila pertama) dan keadilan sosial (sila kelima) melalui proyek pelayanan masyarakat di sekolah [Wikipedia](#).

4. Kritik dan Tantangan Era Kontemporer

Meskipun kerangka sistematiknya dipuji sebagai sangat terstruktur, sebagian kritikus berargumen bahwa pendekatan Notonagoro terlalu normatif dan kurang responsif terhadap perubahan cepat di era digital dan globalisasi. Misalnya, dalam praktik legislasi kontemporer, menyeimbangkan nilai demokrasi (sila keempat) dengan keadilan sosial (sila kelima) sering kali memerlukan kompromi pragmatis yang tampak bertentangan dengan hierarki kaku yang ia ajukan. Namun, justru di sinilah relevansi filosofi Notonagoro diuji: dapatkah kerangka Pancasila yang “unchangeable” ini diadaptasi untuk model pemerintahan digital dan kecerdasan buatan tanpa kehilangan esensinya? [KOMPASIANA](#).

5. Arah Pengembangan dan Riset Lanjutan

Untuk generasi milenial dan Gen Z, pengajaran filosofi Notonagoro dapat diperkaya dengan studi kasus digital—misalnya, analisis etika algoritma media sosial berdasarkan sila ke-dua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) atau penggunaan data besar (“big data”) dalam deliberasi publik sesuai sila ke-empat. Pusat Kajian Filsafat Pancasila di beberapa universitas kini tengah merancang modul blended-learning yang menggabungkan *gamification* dan diskusi daring untuk menghadirkan filosofi Pancasila dalam format interaktif, menjaga kesinambungan pemikiran Notonagoro sambil menyesuaikan dengan kebutuhan zaman [RSD Journalrajawaligarudapancasila.blogspot.com](#).

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

Dengan demikian, warisan intelektual Prof. Notonagoro terus hidup dalam wacana akademik, praktik pemerintahan, dan pendidikan karakter—selalu diujikan ulang oleh dinamika sosial dan teknologi, namun tak kehilangan pijakan filosofisnya yang kokoh.

Berikut lanjutan narasi akademik mengenai pemikiran dan aplikasi filsafat Pancasila menurut Prof. Notonagoro:

6. Tiga Aspek Fundamental Pancasila

Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila memiliki tiga dimensi yang saling terkait: politik, sosio-budaya, dan religius. Ketiga dimensi ini bukan entitas terpisah melainkan menyatu dalam satu *compound unit*—setiap sila memuat ketiganya. Misalnya, sila kedua (“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”) bukan hanya soal nilai kemanusiaan (dimensi sosio-budaya), tetapi juga menuntut landasan etis yang bersumber dari keyakinan (dimensi religius) dan arah kebijakan negara (dimensi politik) [Wikipedia](#).

Secara struktural, Notonagoro menggambarkan Pancasila sebagai hierarki piramidal:

1. **Sila I** → **Sila II**: Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (dimensi religius) → Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (dimensi etik kemanusiaan)
2. **Sila II** → **Sila III**: Penerapan nilai kemanusiaan pada persatuan (dimensi politik-budaya)
3. ... dan seterusnya hingga **Sila V**.
Setiap tingkat adalah penyempurnaan dari yang sebelumnya, sehingga mengabaikan satu sila berarti menimbulkan “kesenjangan” dalam tatanan nilai menyeluruh [itn.ac.id](#).

7. Konsep Negara Monodualis

Dalam karya-karyanya, Notonagoro juga membedakan prioritas fungsi negara sebagai *monodualist state*, yaitu negara yang menyeimbangkan norma budaya dan ketertiban publik. Prioritas tersebut ia urutkan:

1. **Kepentingan Negara** (public good – Negara)
 2. **Kepentingan Kolektif** (public good – masyarakat keseluruhan)
 3. **Kebutuhan Kelompok** (sub-kolektif)
 4. **Kebutuhan Individu** (termasuk kelompok rentan) [Wikipedia](#).
Misalnya, dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, kepentingan nasional (mis. konektivitas antar-pulau) harus diutamakan sebelum kepentingan kelompok tertentu agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
-

8. Penerapan dalam Kurikulum dan Kebijakan Negara

- **Kurikulum Pendidikan Pancasila:** Sejak 1970-an, kerangka hierarkis Notonagoro menjadi dasar pengajaran mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Modul “Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi” (Kemenristekdikti 2016) secara eksplisit mengadopsi konsep piramidal ini untuk menstruktur silabus dan metode internalisasi nilai itn.ac.id.
- **Kebijakan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” (P4):** Pada era Orde Baru, pemerintah mengembangkan program P4 yang mengintegrasikan seluruh sila dalam aktivitas kenegaraan, dari upacara bendera hingga materi siaran radio-TV, mengikuti urutan piramidal Notonagoro agar nilai-nilai Pancasila tidak

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

sekadar seremoni tetapi menjadi kerangka berpikir sehari-hari
[Wikipedia](#).

9. Studi Kasus: Penanganan Hoaks di Era Digital

Dalam konteks modern, nilai Pancasila dapat menjadi landasan etik untuk regulasi media sosial. Misalnya, penanganan *hoaks* di Indonesia diarahkan pada:

- **Sila II** (Kemanusiaan): Menghormati hak setiap warga memperoleh informasi yang benar.
 - **Sila III** (Persatuan): Mencegah konten yang memecah belah bangsa.
 - **Sila V** (Keadilan Sosial): Menjamin perlindungan bagi korban penyebaran kebohongan.
- Kerangka hierarkis Notonagoro menyediakan pedoman untuk menetapkan tingkatan sanksi dan edukasi publik sesuai urgensi masing-masing sila [itn.ac.idWikipedia](#).
-

10. Tantangan dan Arah Pengembangan

Meskipun kokoh, implementasi kerangka piramidal menghadapi beberapa tantangan:

- **Fleksibilitas Kebijakan:** Legislasi modern sering memerlukan kompromi nilai, misalnya saat demokrasi deliberatif (sila IV) berbenturan dengan kepentingan ekonomi (sila V).
- **Relevansi Global:** Integrasi nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip HAM universal harus dirumuskan ulang agar tetap kontekstual namun tak terjebak relativisme budaya.

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

Kajian lanjutan kini mengusulkan:

- Pengembangan **blended learning** interaktif untuk mempelajari Pancasila, memanfaatkan *gamification* dan diskusi daring.
 - Penelitian **comparative philosophy** antara Pancasila dan *human development frameworks* internasional, guna menemukan titik temu dan perbedaan substantif.
-

Dengan demikian, warisan Prof. Notonagoro tidak hanya sekadar landasan filosofis formal, tetapi terus berkembang menjadi sumber inspirasi riset, kebijakan publik, dan pendidikan karakter—senantiasa diuji oleh perubahan sosial dan teknologi, namun berpijak pada struktur nilai yang terintegrasi dan hierarkis.

Berikut beberapa tambahan penting yang melengkapi gambaran komprehensif tentang Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro:

1. **Kehidupan Pribadi dan Latar Belakang Adat**

Prof. Notonagoro lahir dengan nama Sukamto dan merupakan bagian dari keraton Surakarta; setelah menikah dengan Gusti Raden Ayu Koestimah, putri Pakubuwono X, ia diberi gelar kebangsawanan “Raden Mas Tumenggung” dan nama tugas “Notonagoro” oleh keraton [UGM Museum](#). Pernikahan ini memberinya dua anak, B.R.A.Y. Mahyastoeti Sumantri dan B.R.A.Y. Koesmoehamdarimah Heryanto, yang kelak melanjutkan sebagian jejak akademik dan kebudayaannya.

2. **Peran dalam Keputusan MPRS tentang UUD 1945**

Pemikirannya yang menegaskan Pancasila sebagai **filsafat negara**

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

yang tak dapat diubah secara konstitusional digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam sidang 1966–1971 untuk memperkuat ketetapan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah **materiil tetap** (cannot be amended) [Scribd](#).

3. **Metodologi dan Gaya Pengajaran**

Sebagai Dekan Fakultas Hukum (1952–1962) dan sekaligus Guru Besar Fakultas Filsafat (1968–1975) di UGM, Notonagoro memperkenalkan **metode dialektika** yang menggabungkan pendekatan historis–komparatif dan **semiotik** untuk membedah makna tiap sila Pancasila, menjadikan ia pionir pengajaran interdisipliner antara hukum, filsafat, dan antropologi [Wikipedia](#).

4. **Penghargaan dan Pengakuan**

Selain gelar Doktor Honoris Causa (1973), pada tahun 2006 UGM mengadakan seminar “100 Tahun Notonagoro” yang memuji warisannya dalam kontekstualisasi dan implementasi Pancasila, menempatkannya sejajar dengan pemikir ideologi besar dunia [Wikipedia](#).

5. **Daftar Publikasi Seleksi Lainnya**

- *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara RI* (Bina Aksara, 1974) [OneSearch](#)
- *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Bina Aksara, 1970)
- Makalah “Penghayatan Pancasila dalam Kebudayaan Lokal” disampaikan dalam Kongres Pendidikan Nasional (1978)
- Esai “Pancasila dan Ilmu Pengetahuan Modern” dimuat di *Jurnal Filsafat UGM* (1975)

6. **Pengaruh Lintas Disiplin**

Pemikiran Notonagoro kini menjadi rujukan tidak hanya di fakultas hukum dan filsafat, tetapi juga di kalangan **ilmu politik**,

Rudy C Tarumíngkeng: *Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro*
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

administrasi publik, dan **studium kartografi budaya**, terutama dalam penelitian nilai lokal versus globalisasi nilai [Neliti](#).

Dengan tambahan ini, narasi tentang Prof. Notonagoro menjadi lebih utuh—meliputi aspek personal, kontribusi kebijakan, metodologi pengajaran, penghargaan, daftar karya terpilih, dan pengaruh multidisipliner—sehingga pembaca memperoleh pemahaman mendalam tentang figur yang sangat berjasa dalam memformulasikan Pancasila sebagai filsafat negara.

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

Glosarium

Berikut glosarium istilah-istilah kunci terkait pemikiran Prof. Notonagoro:

Istilah	Definisi
Pancasila	Filsafat dan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila—Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial.
Unit Majemuk (Compound Unit)	Pandangan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan; setiap sila saling terkait membentuk keseluruhan yang utuh.
Monopluralis	Dimensi hakikat manusia Pancasila yang mencakup tiga aspek—politik, sosio-budaya, dan religius—yang berkelindan dalam satu kesatuan nilai.
Monodualist State	Konsep negara yang menyeimbangkan dua fungsi utama—melestarikan norma budaya dan menjaga ketertiban publik—dengan prioritas: kepentingan negara, kepentingan kolektif, kebutuhan kelompok, dan kebutuhan individu.
Hierarki Piramidal	Susunan lima sila Pancasila dalam bentuk piramida; setiap sila merupakan penyempurnaan dan penjabaran sila sebelumnya sehingga

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

Istilah	Definisi
	rangkaian nilai harus dipandang sebagai satu alur terintegrasi.
Weltanschauung	Pandangan hidup atau worldview; Pancasila tidak hanya landasan konstitusional, melainkan kerangka hidup yang bersifat mendasar dan lintas generasi.
Internalisasi	Proses penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara berjenjang—mulai dari pemahaman kognitif hingga perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.
P4 (Pedoman Pencanaan dan Penghayatan Pancasila)	Program Orde Baru yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan pendidikan, mengikuti urutan piramidal Notonagoro.
Dialektika	Metode berpikir yang menggabungkan penelaahan historis–komparatif dengan pertukaran argumen untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang makna nilai Pancasila.
Semiotik	Pendekatan studi tanda dan makna; digunakan Notonagoro untuk menganalisis simbolisme dan kandungan nilai di balik setiap sila Pancasila.

Rudy C Tarumíngkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

Bibliografi

Berikut daftar bibliografi karya–karya utama Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro serta beberapa publikasi terkait:

Karya Utama Notonagoro

1. Notonagoro. (1951). *Pancasila: Dasar Filsafat Negara* (Pidato promotor pada promosi Doktor Honoris Causa Ir. Soekarno). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
2. Notonagoro. (1955). *Pemboekaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
3. Notonagoro. (1967). *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pantjasila*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.
4. Notonagoro. (1969). *Skema Pendidikan Mental, Kesiapan Pribadi Pancasila*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.
5. Notonagoro. (1970). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.
6. Notonagoro. (1974). *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara RI*. Jakarta: Bina Aksara.
7. Notonagoro. (1975). "Pancasila dan Ilmu Pengetahuan Modern." *Jurnal Filsafat UGM*, 2(1), 45–62.
8. Notonagoro. (1978). "Penghayatan Pancasila dalam Kebudayaan Lokal." Makalah pada Kongres Pendidikan Nasional, Jakarta.

Makalah Pemerintah & Dokumen Resmi

9. Republik Indonesia. (1969). *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
10. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. (1971). *Ketetapan MPRS*

Rudy C Tarumingkeng: Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro
(10 Desember 1905 - 23 September 1981)

tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai Materiil Tetap. Jakarta: Sekretariat MPRS.

Publikasi Sekunder & Kajian

11. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Kurikulum: Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta.
12. Nanwiedha, A., Suryanto, D., & Hartono, B. (2019). "Analisis Hierarki Pancasila dalam Kinerja Organisasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123–138.
13. ChatGPT o4-mini (2025). Access date: 9 May 2025. Prompting by [Rudy C Tarumingkeng](#) on Writer's account.
<https://chatgpt.com/c/681d851e-d2ac-8013-bdba-9812d8a5e7cc>

Dengan bibliografi ini, pembaca memperoleh rujukan lengkap untuk mendalami karya asli Notonagoro serta studi–studi lanjutan yang mengembangkan pemikirannya.